

## **Peran Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali**

**Arie Ismail\***  
**Abdul Hakim\*\***

### **Abstract**

*This study analyzed the impact of balanced funds that consist of the Revenue Sharing (DBH), General Allocation Fund (DAU), and the Special Allocation Fund (DAK), population, level of education and health to the amount of poverty in the province of Bali. This study is a panel data analysis consists of nine districts or cities in 2006-2011. The results showed that DBH, DAU, education, and health have negative effects to the amount of poverty and population has no correlation with the poverty.*

**Keyword:** Balanced funds, population, healthy, education, poverty.

### **Pendahuluan**

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menganggap kemiskinan sebagai salah satu perwujudan dari taraf hidup yang rendah di negara-negara sedang berkembang dan merupakan tantangan yang sangat besar. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan bahkan dianggap sebagai inti dari semua masalah pembangunan, sehingga hal tersebut dijadikan tujuan utama kebijakan di banyak negara khususnya negara berkembang. Oleh karena itu, PBB menempatkan peniadaan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim pada urutan pertama dari delapan tujuan pembangunan abad milenium (*millenium development goals/MDGs*) yang disepakati oleh 191 negara pada tahun 2000 dan harus dicapai pada tahun 2015 (Tambunan, 2009).

Menurut BPS (2006), tingkat kemiskinan di Indonesia pernah menurun pada kurun waktu 1976-1996, yaitu dari 40,1 persen menjadi 11,3 persen dari total penduduk Indonesia. Tetapi pada periode 1996-

\* Dosen tetap FE UII

\*\* Mahasiswa Jurusan Akuntansi FE UII

1999, jumlah penduduk miskin kembali meningkat, disebabkan oleh krisis yang terjadi di Indonesia pada waktu itu. Jumlah penduduk miskin meningkat dari 22,5 juta jiwa (11,3 persen dari total populasi) menjadi 47,9 juta jiwa (23,43 persen dari total populasi).

Dari perhitungan yang dilakukan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik berbagai tahun, jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia menurun dari tahun 2004 ke 2005 yaitu 36,10 juta jiwa (16,66 persen) menjadi 35,10 juta jiwa (15,97 persen). Namun, pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 39,30 juta jiwa (17,75 persen) hal ini disebabkan karena harga barang-barang kebutuhan pokok saat itu naik tinggi sebesar 17,95 persen. Namun mulai tahun 2007 sampai Maret 2013 jumlah maupun persentase penduduk miskin mulai menurun yaitu pada tahun 2007 menjadi sebesar 37,17 juta jiwa (16,58 persen) dan pada tahun 2013 menjadi sebesar 28,07 juta jiwa (11,37 persen).

Ada beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kemiskinan, yakni rendahnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dan rendahnya tingkat pendidikan. Kemiskinan juga bisa ditengarai oleh banyaknya orang yang sakit karena sulit memperoleh layanan kesehatan karena biaya pengobatan yang mahal. Sarana dan prasarana kesehatan merupakan salah satu hal penting yang harus ada di setiap wilayah. Banyaknya sarana dan prasarana kesehatan di suatu wilayah secara tidak langsung menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat.

Faktor lain yang diduga turut mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah desentralisasi daerah dalam ujud otonomi daerah. Sebelum terjadi otonomi daerah, perekonomian daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat. Masa tersebut juga ditandai dengan tingginya ketimpangan pembangunan antar daerah. Dengan UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999

yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber daya keuangan yang ada di daerahnya. Untuk membantu daerah melaksanakan kewenangannya, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah, terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sinaga dan Siregar (2010) mengemukakan bahwa penerapan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kinerja fiskal daerah. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah, yang akan meningkatkan perekonomian daerah. Walaupun dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah, kebijakan desentralisasi fiskal belum efektif dalam mengurangi kesenjangan output antar daerah dalam suatu daerah tertentu. Akibatnya daerah yang relatif maju dengan infrastruktur yang memadai akan semakin maju dibanding daerah-daerah yang infrastrukturnya kurang. Secara umum, peningkatan penerimaan daerah berdampak positif terhadap pengeluaran daerah. Walaupun kebijakan desentralisasi fiskal belum efektif menurunkan kesenjangan ekonomi antar daerah, tetapi kebijakan tersebut cenderung mampu memperbaiki kesenjangan pendapatan antar kelompok pendapatan masyarakat dan secara umum dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Dengan adanya pemberian tanggung jawab dan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat berharap agar pemerintah daerah kabupaten/kota dapat meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki layanan masyarakat. Dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut maka pemerintah kabupaten/kota

memiliki kesempatan yang lebih besar dalam penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di daerahnya masing-masing karena lebih dekat dan mudah untuk memantau proyek apa saja yang tepat dan sesuai dengan potensi dan sumber daya masyarakat yang ada.

Propinsi Bali yang dikenal oleh orang sebagai tujuan pariwisata dunia juga tidak lepas dari permasalahan ekonomi. Banyak orang yang hanya melihat bahawa Bali sudah mengalami kemajuan yang pesat terutama di bidang pariwisata dan masyarakatnya terlihat sejahtera, namun pada kenyataannya masih ada beberapa daerah di Bali yang masih mengalami masalah ekonomi terutama masalah kemiskinan. Oleh karena itu, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh apakah desentralisasi fiskal di Propinsi Bali dapat mengatasi persoalan ekonomi, terutama masalah kemiskinan. Analisis akan difokuskan pada peran dana perimbangan terhadap kemiskinan. Beberapa variabel kontrol yang penting juga akan dimasukkan dalam model, yakni kesehatan, pendidikan dan jumlah penduduk, terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

Beberapa penelitian telah mengalisis topik yang diangkat dalam peper ini. Harniati (2007) dalam penelitiannya mengenai tipologi kemiskinan dan kerentanan berbasis agroekosistem menemukan bahwa kemiskinan berhubungan kuat dengan agroekosistem, tidak terjadi secara acak tetapi mengikuti pola-pola tertentu (*systematic patterns*) dan berbeda pada tiap agroekosistem. Temuan dan simulasi terhadap indikator kemiskinan memperlihatkan bahwa ada keragaman dan kerentanan di antara agroekosistem.

Rindayanti (2009) meneliti dampak dari desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketahanan pangan di Jawa Barat menggunakan model sistem persamaan simultan yang terdiri dari empat blok persamaan

yaitu blok Fiskal Daerah, PDRB, Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, data yang digunakan berupa data panel yang terdiri atas data 13 kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 1995-2005. Dia menemukan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan penerimaan dan pengeluaran fiskal daerah, namun penerimaan terbesar terjadi pada dana transfer dari pemerintah pusat (DBH, DAU, DAK). Selama periode desentralisasi fiskal, telah terjadi pertumbuhan ekonomi, perlambatan laju penurunan jumlah penduduk miskin, peningkatan penduduk rawan pangan, penurunan ketahanan pangan dari sisi konsumsi, kebijakan peningkatan pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap penerimaan daerah yang akan memengaruhi pengeluaran rutin, dan pembangunan serta meningkatkan kinerja perekonomian dan menurunkan kemiskinan.

Taaha dkk. (2011), melakukan penelitian mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka menemukan bahwa DBH, DAU, dan DAK meningkatkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta. Dengan kata lain, dana perimbangan yang dialokasikan pada pembangunan infrastruktur ekonomi akan berpengaruh pada investasi swasta, dengan adanya kegiatan investasi swasta maka akan tercipta kesempatan kerja dan menciptakan *multiple effect* sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Muslianti (2011), meneliti dampak kebijakan fiskal daerah terhadap kemiskinan di Indonesia menggunakan sistem persamaan simultan. Dia menemukan bahwa seluruh simulasi kebijakan fiskal daerah memberikan dampak positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin dengan besaran yang berbeda-beda dan dampak terbesar dari kebijakan

fiskal terhadap penurunan penduduk miskin tersebut berasal dari simulasi kebijakan kombinasi peningkatan pengeluaran pertanian dan peningkatan pengeluaran pendidikan dan kesehatan.

Asdar (2012), dalam penelitiannya tentang pengaruh dana perimbangan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan Periode Tahun 2001-2010 menggunakan metode *Ordinary Least Square*, dan menemukan bahwa besaran Dana Perimbangan melalui Belanja Daerah mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan tahun 2001-2010.

Anggraini (2012) meneliti pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan, dan konsumsi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan metode analisis jalur (*Path Analysis*) yang menggunakan data antar ruang (cross section) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009. Dia menemukan bahwa rata-rata lama sekolah paling dominan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

### **Landasan Teori**

Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan dikehendaki oleh si miskin dan ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraannya sehingga menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki dan dimanfaatkan terutama dari tingkat pendidikan formal maupun nonformal dan membawa konsekuensi terhadap pendidikan informal yang rendah (lihat misalnya Heinz, 1998). Menurut Bellingèr (2007), kemiskinan bersifat multidimensi, multidefinisi dan multi

pengukuran, bisa diukur dalam dimensi kekayaan dan dimensi non-faktor keuangan. Townsend (2006) menyatakan bahwa sebuah keluarga dikatakan miskin jika pendapatan mereka tidak cukup untuk menyediakan kebutuhan fisik secara efisien. Peters dkk. (2008) menyatakan bahwa masyarakat di negara-negara berkembang cenderung memiliki akses yang lebih sedikit terhadap jasa kesehatan dari pada masyarakat di negara-negara yang lebih maju. Lebih jauh lagi, dalam suatu negara, penduduk miskin memiliki akses yang lebih kecil atas jasa kesehatan.

Desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh terhadap peran pemerintah daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah. Sumber-sumber keuangan daerah yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No 25 tahun 1999, meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DP). PAD terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Restribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah (BUMD), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. DP atau bantuan atau transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Departemen Dalam Negeri, 2002).

Dana perimbangan adalah dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar digunakan untuk mengembangkan apa yang ada dan menjadi prioritas di daerah masing-masing agar menjadi lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, "Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi". Dana Perimbangan bertujuan

mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah pusat dan antar Pemerintah Daerah.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah. Dana Bagi Hasil dialokasikan dari pendapatan tertentu dalam APBN kepada Daerah dalam persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil tersebut bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan memberikan akses yang lebih besar kepada daerah terhadap sumber-sumber penerimaan yang cukup besar (DJPK, 2013).

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksud dengan dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi., besarnya DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen dari pendapatan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk daerah Provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangn kewenangan antar provinsi dan kabupaten/kota (DJPK, 2013).

Penduduk adalah orang-orang yang berada di suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus. Secara umum, tampaknya ada kekhawatiran bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan satu dari penyebab kemiskinan. Namun revolusi hijau yang terjadi telah mengubah pendapat banyak orang, dimana sekarang pertumbuhan pangan bisa terjadi jauh

lebih cepat. Ditambah dengan kebijakan pertumbuhan populasi di berbagai belahan negara di dunia, tampaknya jumlah penduduk bukan merupakan sebuah ancaman yang tidak bisa diatasi terhadap masalah kemiskinan.

Pendidikan merupakan investasi yang bersifat jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Secara umum, para ahli tampaknya sepakat bahwa pendidikan yang semakin baik akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Kesehatan merupakan salah satu indikator kemiskinan dalam pembangunan; kesehatan yang baik menunjukkan kemakmuran. Menurut BPS, kesehatan diukur melalui presentase gizi buruk, angka kematian bayi, dan angka kematian ibu melahirkan. Tingkat kesehatan juga dipengaruhi beberapa faktor dan yaitu faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit (kemiskinan), kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, serta tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran (Kuncoro, 2000).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menganalisis kemiskinan sebagai fungsi dari dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), jumlah penduduk, pendidikan, dan kesehatan. Lokasi penelitian adalah sembilan Kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2006 sampai 2011. Data yang digunakan adalah persentase jumlah penduduk miskin di

Kabupaten/kota, jumlah dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH), jumlah penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, pendidikan yang diproksi dengan jumlah siswa SMA, dan tingkat kesehatan yang diproksi dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Model yang dibangun bisa dipresentasikan sebagai berikut:

$$\ln Y = \beta_1 + \beta_2 \ln DBH + \beta_3 \ln DAU + \beta_4 \ln Pop + \beta_5 \ln DIDIK + \beta_6 \ln FASKES + u \quad (1)$$

dimana  $Y$  = persentase penduduk miskin terhadap populasi total,  $DBH$  = Dana Bagi Hasil,  $DAU$  = Dana Alokasi Umum,  $Pop$  = Total populasi,  $DIDIK$  adalah tingkat pendidikan,  $FASKES$  = Fasilitas Kesehatan, dan  $\ln$  adalah logaritma natural.

Penelitian ini menggunakan pendekatan data panel dengan menggunakan alat bantu software Eviews. Dalam analisis dikenal tiga jenis pendekatan, yakni pendekatan *pooled OLS*, *fixed effect* dan *random effect*. Pendekatan *pooled OLS*, disebut juga pendekatan *common effect*, memerlukan asumsi yang kuat, yakni bahwa setiap obyek *cross-section* memiliki intersep yang sama, sehingga model ini dianggap lemah. Metode *random effect* memilih estimasi data panel dengan residual yang mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu, dengan mengasumsikan setiap kabupaten/kota mempunyai perbedaan intersep, namun diasumsikan bahwa intersep merupakan variabel random.

Untuk mengetahui apakah pendekatan *fixed effect* lebih baik dibanding pendekatan *common effect*, paper ini menggunakan statistik  $F$ , yakni

$$F = \frac{(RSS1 - RSS2)/m}{(RSS2)/(n - k)} \quad (2)$$

dimana  $RSS_1$  dan  $RSS_2$  merupakan *residual sum of squares* dari, berturut-turut, teknik *common effect* dan teknik *fixed effect*. Nilai F-hitung seiring dengan distribusi statistik  $F$  dan derajat kebebasan  $m$  untuk numerator dan  $n-k$  untuk denominator, dimana  $m$  merupakan jumlah restriksi atau pembatasan didalam teknik *common effect*,  $n$  merupakan jumlah observasi, dan  $k$  adalah jumlah parameter dalam model *fixed effect*. Jika F-hitung lebih besar dari F-kritisnya maka menolak  $H_0$  bahwa intersep sama dan metode yang tepat digunakana adalah metode *common effect*.

Untuk memilih pendekatan terbaik di antara model *fixed effect* dan *random effect*, paper ini menggunakan Uji Hausman. Hasil penentuan nilai Uji Hausman diperoleh dengan membandingkan nilai statistik *chi-squares* dengan nilai kritis *chi-squares* dengan derajat bebas  $k$  (jumlah variabel independen). Jika nilai *chi-square* uji melebihi nilai *chi-square* kritis, maka kita menolak  $H_0$  bahwa teknik yang tepat adalah teknik *random effect*.

### **Analisis**

Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok dengan luas wilayah 5.636.660 km<sup>2</sup>. Provinsi Bali terbagi atas delapan kabupaten dan satu kotamadya, yakni Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar. Tingkat kemiskinan di Propinsi Bali masih cukup tinggi, dikarenakan adanya beberapa daerah yang tertinggal, kondisi alam yang sulit untuk di manfaatkan, serta banyak orang yang dari daerah melakukan urbanisasi ke kota dengan pendidikan dan kemampuan yang kurang untuk bersaing di

kota. Berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah Propinsi Bali telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan tersebut.

Hasil regresi dengan teknik *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* ditayangkan dalam Tabel 1.

**Tabel 1: Hasil Regresi dengan Metode Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect**

Variable	Common Effect		Fixed Effect		Random Effect	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.
C	6.58	0.03	31.24	0.00	8.17	0.00
ln DBH	-0.38	0.00	-0.10	0.04	-0.29	0.00
ln DAU	-0.13	0.53	-0.39	0.02	-0.19	0.09
ln DAK	0.13	0.03	0.06	0.04	0.09	0.00
ln Pop	0.25	0.33	-0.04	0.85	0.14	0.33
ln DIDIK	-0.27	0.09	-0.32	0.00	-0.34	0.00
ln FASKES	0.19	0.34	-2.81	0.02	0.31	0.04
F-statistic		20.51		58.59		11.88
Prob(F-statistic)		0.00		0.00		0.00

Untuk mendapatkan teknik yang paling tepat, pertama kali akan dibandingkan hasil dari metode *common effect* dan hasil dari metode *fixed effect*, ditayangkan dalam Tabel 2.

**Tabel 2: Hasil Uji Fixed Effect Test**

Effects Test	Stat	Df	Prob
Cross-section F	24.808	(8,39)	0.00
Cross-section Chi-square	97.748	8	0.00

Dari hasil dari perhitungan tersebut, F-hitung adalah 24.808 dan nilai F-Kritis dengan numerator 8 dan denominator 39 pada tingkat signifikansi 5% adalah 2.19. Dengan demikian kita menolak hipotesis nol, yang

berarti bahwa metode *fixed effect* lebih tepat dibanding model *common effect*.

Langkah selanjutnya adalah memilih teknik terbaik antara teknik *fixed effect* dan *random effect*, yang hasilnya bisa dilihat di Tabel 3.

**Tabel 3: Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-square Statistic	df	Prob
Cross-section Random	78.007	6	0.00

Dari hasil dari perhitungan cross-section random diatas, nilai chi-square uji adalah 78.007 dan nilai chi-square dengan derajat bebas 4 pada tingkat signifikansi 5% adalah 12.59. Hal itu menunjukkan bahwa nilai chi-square lebih besar dari chi-square tabel, sehingga kita menolak hipotesis nol, sehingga metode panel data yang tepat digunakan adalah *fixed effect* dibandingkan dengan metode *random effect*.

Dari hasil analisis *fixed effect*, diketahui bahwa semua variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali, kecuali variabel jumlah penduduk. Uji bersama juga menyatakan bahwa statistik F memiliki probabilitas nol, sehingga bisa dikatakan bahwa secara umum, variable-variabel yang dimasukkan ke dalam model tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kemiskinan di provinsi tersebut.

Selanjutnya, untuk mengantisipasi adanya heteroskedastisitas, perbaikan yang dilakukan terhadap metode *fixed effect* dengan cara menghilangkan heteroskedastisitas, yang secara umum menghasilkan kesimpulan yang sama. Petikan hasil regresi yang sudah memperhitungkan heteroskedastisitas tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4: Hasil Regresi Fixed Effect dengan Pembobotan**

Variable	Coefficient	Prob
C	27.854	0.000
ln DBH	-0.120	0.011
ln DAU	-0.336	0.012
ln DAK	0.068	0.005
ln Pop	0.061	0.686
ln DIDIK	-0.325	0.004
ln FASKES	-2.591	0.025
Fixed Effects (Cross)		
_BANGLI—C	-1.102	
_BDG—C	-0.146	
_BULLNG—C	1.443	
_DPS—C	-0.933	
_GIA—C	0.389	
_JMB—C	-0.789	
_KLUNG—C	-1.194	
_KRGSM—C	0.969	
_TAB—C	1.363	

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa sembilan kabupaten/kota memiliki intersep yang berbeda-beda, menunjukkan keunggulan metode *fixed effect* dibandingkan dengan metode *common effect*. Analisis lebih jauh dari hasil regresi di atas akan dibahas dalam beberapa paragraf berikut ini.

Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali. Diperhitungkan bahwa tiap desa di Bali akan mendapatkan alokasi dana dari APBN dengan jumlah lebih dari satu miliar per tahun. Bila ditambahkan dengan pemasukan lain yang diatur dalam UU Desa maka diperkirakan setiap desa sedikitnya akan memiliki alokasi dana lebih dari Rp 2 miliar rupiah per tahun. Jika setiap desa memiliki dua puluh banjar, berarti setiap banjar mendapat jatah sekitar seratus juta rupiah per tahun, atau akan tersedia dana paling tidak Rp 8 juta rupiah per bulan. Alokasi dana ke setiap desa adat tersebut

tampaknya cukup besar dalam mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Provinsi Bali (lihat Marhaendra 2013).

Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali. Hal ini bisa dijelaskan oleh fakta bahwa kemiskinan terkait erat dengan ketimpangan kesejahteraan. Salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan antar daerah dengan pemberian Dana Alokasi Umum (lihat Juanda et al. (2012)). Pemberian DAU bisa mengurangi ketimpangan kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali, yang harus dianalisis dengan hati-hati. Secara keseluruhan, daerah Bali memperoleh dana perimbangan Rp 4,256 triliun. Perlu dicatat bahwa pemberian DAK tidak seragam antar kabupaten. Kabupaten Badung hanya mendapatkan DAK Keselamatan Transportasi Darat sebesar Rp 290,9 juta dan tidak memberikan DAK dalam bentuk yang lain, karena Kabupaten Badung digolongkan sebagai daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi. Kota Denpasar hanya memperoleh DAK Pelayanan Farmasi (Kesehatan) sebesar Rp 3,079 miliar dan DAK Keselamatan Transportasi Darat sebesar Rp 477,9 juta, juga karena digolongkan sebagai daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi. Dapat disimpulkan bahwa alokasi DAK di Provinsi Bali tampaknya memang tidak didesain untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Jumlah Penduduk di Provinsi Bali tidak berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan peningkatan proporsi penduduk produktif sebagai akibat dari arus migrasi yang masuk ke Bali dengan tujuan mencari pekerjaan. Jika penduduk asli tidak

mampu bersaing dengan penduduk pendatang yang produktif maka peningkatan jumlah penduduk yang didominasi oleh pendatang tidak akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Bali.

Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali. Terkait dengan pembangunan manusia, kemiskinan bisa dikatakan sebagai salah satu cerminan dari ketidakberhasilan dalam pembangunan manusia. Kemiskinan yang terjadi merupakan implikasi dari ketidakmampuan untuk mendapatkan nafkah. Hal ini bisa dikaitkan dengan pendidikan yang tidak memadai sehingga kemampuan untuk memperoleh pekerjaan menjadi terbatas. Meskipun belum optimal, namun pembangunan pendidikan di Bali telah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Ketersediaan sarana dan prasarana umum, baik itu jumlah sekolah maupun tenaga pendidik sudah bisa dikatakan cukup memadai. Jumlah sekolah tercatat mengalami peningkatan di setiap jenjang pendidikan.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, kesehatan berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali. Kesehatan merupakan salah satu indikator kemiskinan. Kesehatan merupakan salah satu modal utama dalam setiap aktivitas. Akumulasi dari peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kesehatan yang ditunjang juga oleh kemampuan ekonomi masyarakat serta ketersediaan sarana dan prasarana telah mendukung terjadinya peningkatan taraf kesehatan masyarakat Bali secara umum. Hal ini tercermin dari meningkatnya angka harapan hidup penduduk Bali. Pada tahun 2009 angka harapan hidup di Bali mencapai 70,67/tahun, meningkat menjadi 70,72/tahun pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi 70,78/tahun (BPS Provinsi Bali, 2012).

## **Kesimpulan**

Penelitian ini memodelkan kemiskinan di Provinsi Bali periode 2006-2011 menggunakan model ekonometrika data panel. Dari hasil perbandingan tiga buah metode data panel, yakni metode *common effect*, metode *fixed effect*, dan metode *random effect*, paper ini menemukan bahwa metode *fixed effect* adalah metode yang paling sesuai untuk mengestimasi data yang telah dikumpulkan.

Penelitian ini menemukan bahwa Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali, barangkali dikarenakan desain DAK memang bukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Jumlah Penduduk di Provinsi Bali tidak berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali, dikarenakan peningkatan proporsi penduduk produktif sebagai akibat dari arus migrasi yang masuk ke Bali dengan tujuan mencari pekerjaan. Tingkat Pendidikan dan tingkat kesehatan berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali.

## **Penghargaan**

Kedua penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pengembangan Ekonomi, Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, atas bantuan dana untuk proses penyusunan draft dan publikasi makalah ini, dalam skim Hibah Penelitian Tim Dosen-Mahasiswa (PTDM) tahun 2013.

**Daftar Pustaka**

- Anggraini, N. (2012), *Hubungan Kausalitas dari Tingkat Pendidikan, Pendapatan, dan Konsumsi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah.
- Asdar (2011), *Analisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010*, Skripsi Sarjana, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasannudin, Makassar, bisa didownload di <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/3574/A11106052.pdf?sequence=1>.
- Bellinger, W.K. (2007), *The Economic Analysis of Public Policy*, London: Routledge.
- Departemen Dalam Negeri (2002), *Undang-undang No.25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- DJPK (2013), Leaflet DJPK Tahun 2013, Diakses pada 22 Oktober 2013, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/publikasi/leaflet-djpk>
- Harniati (2007), "Tipologi Kemiskinan dan Kerentanan Berbasis Agroekosistem dan Implikasinya pada Kebijakan Pengurangan Kemiskinan," Disertasi, Institut Pertanian Bogors, Indonesia.
- Heinz, K. (1998), *Politik dan Kebijakan Pembangunan Pertanian*, Terjemahan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Juanda, B., M. Sidik, dan R.M. Qibthiyah (2012), *Reformulasi DAU untuk Memperkuat Peran sebagai Equalization Grant*, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kuncoro, M. (2000), *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Marhaendra, T.B.P. (2013), *Dampak UU Desa bagi Desa Adat di Bali*, Diakses pada 25 Desember 2013, dari <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=1&id=8274>.
- Muslianti, D. (2011), *Dampak Kebijakan Fiskal Daerah Terhadap Kemiskinan di Indonesia Pada Masa Desentralisasi Fiskal*, Tesis S-2, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat.
- Peters, D.H., A. Garg, G. Bloom, D.G. Walker, W.R. Brieger, and M.H. Rahman (2008), "Poverty and Access to Health Care in Developing

- Countries,” *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1136, 161–171.
- Rindayanti, W. (2009), *Dampak dari Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi Jawa Barat*, Disertasi, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat.
- Sinaga, B. dan H. Siregar (2005), *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia*, Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat. Diakses pada 7 September 2013, dari <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/6352>.
- Taaha, Y.R., Nursini, dan Agussalim (2010), *Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi tengah*, e-journal, Program Pascasarjana UNHAS pada tanggal 2011-08-03 13:01:01, Diakses pada tanggal 7 September 2013, dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://pasc.a.unhas.ac.id/jurnal/files/26c49caf5eba3beabb89a0acc7aa33ac.pdf>
- Tambunan, T. (2009), *Perekonomian Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Townsend, P. (2006), “What is Pverty? An Historical Perspective,” *Poverty in Focus*, Interntional Poverty Center, United Nations for Development Program, December, pp. 5-6